

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem tata kelola keuangan daerah di Indonesia selama dua dasawarsa ini (2 tahun 2000-2020) telah mengalami perubahan fundamental. Perubahan fundamental tersebut di tandai dengan adanya tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan otonomi daerah tersebut secara umum untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik pelayanan publik, dan mendorong deokrasi daerah (Mahmudi,2010). Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka di lakukan reformasi keuangan daerah. Reformasi menejemen keuangan daerah secara garis besar mencakup perubahan sistem anggaran, perubahan kelembagaan, dan perubahan sistem akuntansi. Berbagai perubahan di atas memberi kewenang kepada daerah untuk mengelola keuangan juga di hadapkan dengan berbagai tantangan. Sejalan dengan itu birokrasi pengelolaan perlu reposisi , revitalisasi dan redesain agar mampu menjawab perubahan dan tantangan kompetisi global.

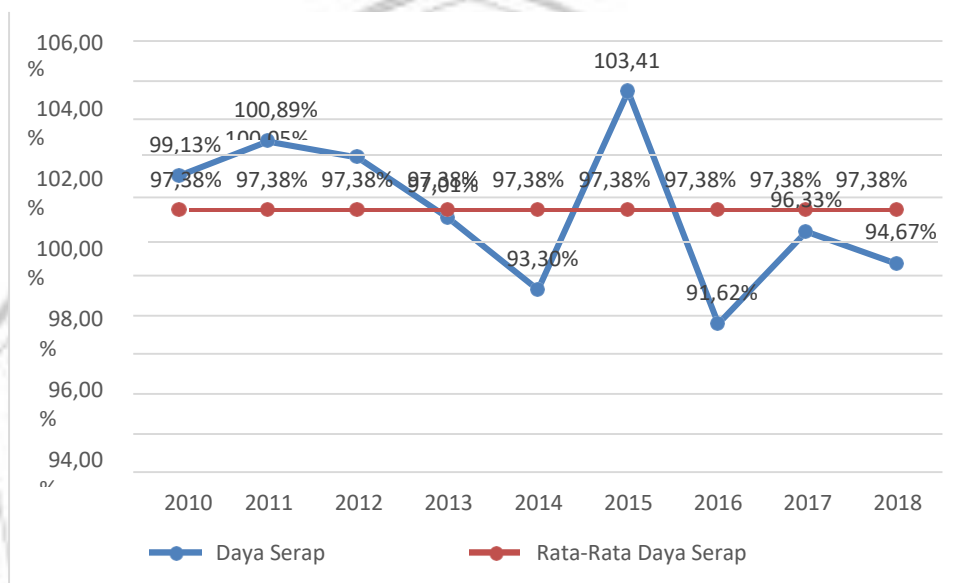
Proses reformasi di Manajemen Keuangan Daerah juga memberi kewenangan kepada daerah antara lain dalam bentuk desentralisasi fiskal. Dalam desentralisasi memberi keluasan kepada daerah untuk mengeola keuangan daerah sesuai aspirasi, kebutuhan. Desentralisasi fiskal tidak berarti pemerintah daerah harus

mengeksploitasi pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah. Karena esensi desentralisasi fiskal lebih ditekankan pada expenditure assignment daripada revenue assignment. Dengan demikian kunci keberhasilan desentralisasi fiskal terletak pada kemampuan daerah dalam hal tata kelola keuangan daerah yang baik. Elemen tata kelola keuangan meliputi antara lain penerapan sistem manajemen keuangan daerah, sistem akuntansi, pengawasan, kelembagaan, sumber daya manusia dan tata administrasi.

Dengan demikian banyak indikator yang dapat di gunakan dalam menilai kinerja keuangan daerah baik sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Indikator yang dapat di gunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo dalam Adhiantoko 2013). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator yang dapat di gunakan dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian, kemampuan daerah dalam menjalankan, mengelola dan mengendalikan sumber daya daerahnya dengan baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pada sisi pendapatan daerah dapat di nilai seberapa besar kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan pada sisi Anggaran Belanja Daerah dapat di nilai berdasarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan secara tepat sesuai target maupun program. Juga indikator lain adalah kemampuan daerah

dalam menyerap anggaran belanja daerah berdasarkan prinsip realisasi belanja daerah.

Berdasarkan data realisasi APBD yang di terbitkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah tahun 2019 rata-rata daya serap belanja daerah di Indonesia sebesar 97.38%.



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah

Gambar 1.1 Grafik daya serap anggaran

Berdasarkan dengan data anggaran dan realisasi belanja daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019), daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia selama periode tahun 2010-2018 (grafik1.1) mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010-2018 daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia, pada tahun 2015 menjadi posisi tertinggi dengan daya serap sebesar 103,41%. Daya serap anggaran belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 91,62%. Rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia pada tahun 2010-2018 adalah 97,38%.

Sedangkan tingkat penyerapan Anggaran Belanja Daerah di Kota Balikpapan dari mulai tahun 2014-2019 juga mengalami hal yang sama yaitu mengalami fluktuatif. Yang mana disebutkan pada tahun 2014 tingkat penyerapan belanja daerah di Kota Balikpapan sebesar 83.23%. Pada tahun 2015 tingkat penyerapan belanja daerah kota Balikpapan mengalami kenaikan sebesar 92.61%. Pada tahun 2016 tingkat penyerapan belanja daerah kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 67.98%. Pada tahun 2017 tingkat penyerapan belanja daerah kota Balikpapan mengalami kenaikan sebesar 92.30%. Pada tahun 2018 tingkat penyerapan belanja daerah kota Balikpapan mengalami kenaikan sebesar 94.12%. Dan pada tahun 2019 tingkat penyerapan belanja daerah kota Balikpapan mengalami kenaikan sebesar 98.80%. Dapat di tarik kesimpulan bahwa penyerapan anggaran belanja daerah Kota Balikpapan mengalami fluktuasi di karenakan dilihat dari kebutuhan belanja yang tiap tahunnya berbeda-beda.

Sebagai salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat kinerja belanja daerah yang didasarkan pada pendekatan tingkat penyerapan belanja. Jika tingkat penyerapan semakin tinggi maka semakin optimal tingkat kinerja belanja tersebut dan jika tingkat penyerapan semakin rendah maka semakin rendah juga kinerja suatu pemerintah daerah. Penyerapan belanja APBD memmandakan kecepatan daerah dalam menggunakan dananya untuk pelayanan ke masyarakat. Maka dengan rendahnya penyerapan anggaran akan menghambat proses pembangunan baik fisik ataupun non fisik. Contoh pembangunan fisik di Kota Balikpapan yaitu

- Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.

- Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar
- Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas

Sedangkan pembangunan non fisik di Kota Balikpapan yaitu :

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa,

- Pembangunan bidang keagamaan.
- Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana.
- Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban.
- Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran.
- Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Faktor perencanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cerminan dari belanja daerah, yang wajib direncanakan dengan baik. Pada faktor perencanaan, melalui perencanaan anggaran yang baik maka akan memudahkan dalam tahap implementasi serta target dapat dicapai secara efektif (Mahmudi, 2010).

Faktor perencanaan adalah faktor yang memastikan semua aktivitas yang dilakukan baik dalam mencapai tujuan maupun target yang akan dicapai. Pada faktor pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pada faktor sumber daya manusia terdapat permasalahan mengenai kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki kurang.

Penyerapan anggaran yang proposional atau tidak tergantung dari tolak ukurnya. Agar penyerapan anggaran dapat maksimal maka, dapat dilihat dari sasaran yang sudah di targetkan. Dalam pembagian anggaran yang efisien maka keterbatasan sumber dana yang di miliki suatu negara juga dapat dimaksimalkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan strategis. Tetapi jika daalam memaksimalkan sasaran anggaran mengalami kegagalan maka yang akan terjadi salah yaitu menghilangkan manfaat belanja, karena dana yang sudah di rencanakan tidak semuanya di gunakan. Dilihat dari mekanisme anggaran pengelolaan keuangan daerah tidak mengalami perubahan yang berarti, yang dimana setiap pendapatan juga harus di kelola oleh pemegang kas daerah.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, pemerintah mengatur tata cara pengadaan barang jasa dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pengadaan barang dan jasa. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan pengadaan barang jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang jasa

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini dilakukan di daerah yang berbeda yaitu bertempat di Kota Balikpapan. Alasan menggunakan judul ini ialah mengenai penyerpan anggaran yang sesuai anatar pencairan dan pelaksanaan dan ingin melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Dengan melakukan pengujian kembali dengan teori yang sama,waktu dan tempat yang berbeda akan memperoleh hasil yang sama atau berbeda. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Daya Serap Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat daya serap anggaran belanja daerah di Kota Balikpapan.
2. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia terhadap daya serap Belanja Daerah di Kota Balikpapan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan Anggaran Belanja Daerah di Kota Balikpapan.

2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya manusia terhadap daya serap belanja daerah di Kota Balikpapan.

D. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini di batasi hanya terkait penyerapan belanja daerah dalam parameter kuantitatif yaitu seberapa besar belanja daerah dapat di realisasikan di banding belanja daerah yang di rencanakan. Tidak mensertakan ukuran kualitatif seperti tercapainya tujuan dan susunan program, aspek yuridis dan lain-lain

